

PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI KABUPATEN MALUKU TENGGARA

MANAGEMENT OF PUBLIC INFORMATION AT INFORMATION AND COMMUNICATION AGENCY OF SOUTHEAST MALUKU

Fatmawati Rumra

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura
Jalan Ir. M. Putuhena Poka Ambon-Maluku, Indonesia
E-mail: idenlesta@gmail.com

(Diterima: 9 Juni 2014; Direvisi: 6 Agustus 2014; Disetujui terbit: 12 Agustus 2014)

Abstrak

Informasi pembangunan merupakan sarana penting bagi pembangunan nasional untuk masyarakat kota dan desa. Membangun dimulai dari ide dan pemikiran yang dilengkapi dengan informasi yang relevan dan perlu disebarluaskan dan diyakini oleh seluruh lapisan masyarakat, karena itu terlebih dahulu pesan dan kebijakan pemerintah harus disebarluaskan guna membangkitkan semangat serta partisipasi masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana lembaga informasi dan komunikasi daerah dalam menghimpun, memproses, dan menyampaikan/menyalurkan data dan informasi publik? Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan pemahaman penarikan *sample* tersebut, maka *sample* penelitian ini meliputi pimpinan lembaga informasi komunikasi (Kepala Dinas Informasi Komunikasi Kabupaten Maluku Tenggara), pejabat struktural unit informasi dan komunikasi, pejabat fungsional unik kerja informasi dan komunikasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga informasi dan komunikasi daerah berbeda nama dan tingkat jenjang struktur tetapi tetap proaktif untuk menghimpun informasi publik khususnya yang diproduksi oleh pemerintah daerah seperti peraturan daerah, kebijakan pemerintah daerah, perizinan, perpajakan, dan distribusi menjadi sangat penting untuk dihimpun karena informasi tersebut sangat penting untuk pengembangan dan kemajuan daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah dalam hal ini Dinas Infokom Kabupaten Maluku Tenggara diharapkan senantiasa melakukan koordinasi terkait kebijakan dengan instansi lain sebagai suatu kegiatan konkret untuk menghimpun informasi publik, dan selanjutnya diolah dengan melalui komputerisasi sebagai salah satu sarana untuk memproses informasi.

Kata kunci : pengelolaan, informasi publik.

Abstract

Development of information is an important tool for national development for urban and rural communities. Building starts of ideas and thoughts that are equipped with the relevant and necessary information disseminated and believed by the whole society, because the first message and the government's policy should be disseminated in order to evoke the spirit and community participation. The problem in this study is how the information and communication agencies in the region to collect, process and deliver / distribute data and public information?, This research uses a descriptive study with a qualitative approach . Engineering pengumpulan data by interview and documentation , on an understanding of the sample withdrawal , the sample of the study include : Leadership communication information agency (Head of Information Communication Southeast Maluku District) , Officer structural units of information and communication , the unique functional Officials working the information and communication the results of the study appointment that information and communication institutions of different areas and levels of ladder structures are names but remain proactive to gather public information diproduk especially by local governments , such as local regulations , local policy , licensing , taxation and the distribution becomes very important for the collected because sangat important information for the development and progress of the region . It can be concluded that the government in this case the Department of Information and Communication Southeast Maluku district expected to constantly coordinate with other agencies in policy as a concrete activity to gather public information, and further processed by means of computerization as one means to process information.

Keywords : management, public information.

PENDAHULUAN

Perkembangan pembangunan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi tentunya tidak hanya untuk aktivitas layanan atau pengelolaan informasi, tetapi juga untuk memengaruhi kebutuhan dalam mengembangkan teknologi informasi serta penunjangnya, seperti perangkat lunak jaringan. Dengan demikian komunikasi dan informasi mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia, masyarakat, dan warga negara, karena komunikasi dan informasi adalah wahana utama dari kegiatan dan kehidupan manusia sehari-hari. Manusia berkomunikasi dengan sesamanya karena mereka saling membutuhkan dan juga manusia bisa berkembang dengan berkomunikasi, sehingga komunikasi penting bagi manusia dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya. Achmad mengemukakan bahwa dalam komunikasi antarmanusia (*human communication*), makna informasi yang kita gunakan adalah sesuatu yang orang (pihak penerima) peroleh sebagai pengetahuan baginya (A.S. 1990). Jadi sesuatu yang sebelumnya tidak atau belum diketahui oleh penerima. Bahkan saat ini informasi telah menyebabkan perubahan yang mendasar pada berbagai aspek, bahkan pada saat ini informasi telah menjadi bahan yang sangat berharga dan menentukan untuk mencapai keberhasilan (Arief 2005).

Sejalan dengan pokok pembahasan mengenai sistem penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah kabupaten dan kota di Kabupaten Maluku Tenggara, secara umum sebelum diberlakukan otonomi daerah, informasi pembangunan disampaikan oleh juru penerangan dan

petugas penyuluh lapangan dari instansi masing-masing di daerah seperti penyuluh kesehatan, penyuluh pertanian, penyuluh peternakan, dan lainnya.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa sistem pelayanan informasi pembangunan pun mengalami perubahan, yakni cenderung hanya membebaskan kepada media massa, sementara informasi pembangunan dan kebijakan pemerintah yang penting diketahui dan dipahami oleh masyarakat, tidak semuanya dapat ter-cover oleh media massa. Maka penyebaran informasi pembangunan dalam beberapa tahun terakhir ini dirasakan sangat kurang sehingga pengelolaan informasi publik oleh lembaga informasi dan komunikasi sangat diperlukan.

Mencermati berbagai kewenangan pemerintah daerah bersama jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan peraturan daerah tentang kelembagaan (perangkat) daerah yang cenderung lebih berorientasi kepada lembaga yang dapat memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah, menyebabkan kelembagaan infokom menjadi salah satu instansi yang cenderung tidak menjadi prioritas utama. Pada dasarnya jika dicermati urgensi fungsi kelembagaan infokom mampu memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat dalam rangka mendukung berbagai kebijakan pemerintah, dengan demikian eksistensi kelembagaan ini seharusnya lebih diprioritaskan bukan seperti jenjang dan bentuk kelembagaan informasi daerah berupa dinas dan badan yang berada pada posisi tertentu, ada yang berupa kantor dan bagian. Perbedaan posisi atau tingkat kelembagaan ini, bukan hanya

berimplikasi pada persoalan koordinasi, tetapi yang lebih nyata adalah persoalan fungsi pelayanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat.

Hasil penelitian Kominfo dalam laporan hasil penelitian dan pengembangan wilayah komunikasi dan informatika tentang Studi Kasus Pengelolaan Informasi Publik Lembaga Infokom Daerah di Sulawesi Selatan, BBPI Wilayah VII Makassar, menunjukkan bahwa pengelolaan informasi publik belum berjalan secara maksimal karena perhatian pemerintah daerah terhadap pengelolaan informasi kepada publik bukan merupakan salah satu prioritas dalam pelayanan publik (Departemen Kominfo 2006). Atas dasar pemikiran tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian yakni bagaimana sistem penyampaian informasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah khususnya Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Maluku Tenggara.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana lembaga informasi dan komunikasi daerah dalam menghimpun data dan informasi publik? Bagaimana lembaga informasi dan komunikasi daerah dalam memproses data dan informasi publik? Bagaimana lembaga informasi dan komunikasi daerah dalam menyampaikan atau menyalurkan informasi publik?

Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan upaya lembaga informasi dan komunikasi daerah dalam menghimpun data dan informasi publik, mendeskripsikan usaha lembaga informasi dan komunikasi daerah dalam memproses data dan informasi publik, dan menguraikan langkah-langkah lembaga informasi dan komunikasi daerah dalam

menyampaikan atau menyalurkan informasi publik.

Manfaat dari hasil penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan peran dan fungsi lembaga informasi dan komunikasi daerah (Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Maluku Tenggara) dalam mengelola informasi publik sehingga bisa menjadi bahan masukan kepada semua pihak terutama kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengkaji lebih cermat tentang urgensi peran dan fungsi kelembagaan informasi pemerintah yang mampu memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah pusat.

LANDASAN TEORI

Mencermati Pasal 121 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan tentang perangkat daerah kabupaten kota, selanjutnya pada Pasal 128 Ayat (1) dijelaskan tentang penetapan organisasi perangkat daerah melalui penetapan peraturan daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada peraturan daerah.

Perangkat daerah yang dimaksud pada Pasal 121 dan 127 adalah sekretaris daerah, sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah yang merupakan unsur otonomi daerah, lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan arah kebijaksanaan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit daerah, dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Dengan landasan

Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 128 dengan melalui penataan daerah maka terbentuklah perangkat daerah dimana kelembagaan informasi dan komunikasi daerah. Di dalam penetapan kelembagaan informasi dan kelembagaan daerah, pemerintah daerah tidak memiliki pandangan yang sama tentang nama kelembagaan dari bentuk kelembagaan informasi dan komunikasi daerah. Dimana pada kondisi objektif yang nampak saat ini bahwa kelembagaan informasi dan komunikasi daerah bermacam-macam bentuk kelembagaannya sesuai dengan peraturan daerah pada masing-masing daerah.

Perlunya informasi dan komunikasi merupakan hasil pengelolaan data sehingga menjadi bentuk bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Untuk memperoleh informasi diperlukan adanya data yang akan diolah di unit pengelolaan transformasi data menjadi informasi sehingga diperoleh suatu keputusan yang benar didasarkan pada informasi yang benar dan berdasarkan pada data yang akurat. Masalah utama dari suatu informasi adalah konsistensi dari suatu data. Data dapat menjadi tidak konsisten dalam beberapa cara antara lain 1. Definisi data, beberapa organisasi atau unit tidak sepakat tentang definisi dan arti data, 2. Struktur data, data yang sama mempunyai format yang berbeda di beberapa tempat, 3. Sistem penyimpanan, data yang sama disimpan dengan struktur yang berbeda di beberapa tempat, dan 4. Waktu perubahan, data dapat diperoleh/diolah dalam jangka waktu bulanan, mingguan, atau secara intensif di beberapa sistem serta membuat beberapa *copy* di beberapa tempat tentang panduan

teknis manajemen data, informasi dan organisasi serta sistem informasi pemerintah (Menkominfo 2004).

Untuk mencapai suatu informasi dan komunikasi yang benar maka salah satu upaya mendorong percepatan pembangunan masyarakat adalah melalui strategi komunikasi yang membawa nilai-nilai baru yang positif sesuai mekanisme yang berlaku sehingga dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai baru tersebut. Kehadiran kelembagaan informasi pemerintah daerah menjadi sangat penting dan merupakan suatu kebutuhan pemerintah daerah untuk mengelola informasi di daerah dalam membangun masyarakat daerah. Sejalan dengan itu untuk mensinergikan kebijakan pemerintah pusat maka diperoleh adanya pembangunan dan pengolahan infrastruktur dan manajemen sistem informasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sehingga keberadaan Dinas Infokom sangat diperlukan. Menurut Alter, sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi (Alter 1992). Hall mengemukakan bahwa sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal dimana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada pemakai (Hall 2000).

Keberadaan infokom daerah seperti Dinas Infokom Kabupaten Maluku Tenggara dalam perencanaan sistem informasi nasional merupakan upaya pemerintah dalam rangka membangun suatu sistem pemerintahan yang terinteraksi dari tingkat kabupaten/kota sehingga pemerintah pusat sebagai pelaksana Undang-Undang No. 32 Tahun

2004 tentang Pemerintah Daerah yang akan diatur pelaksanaannya dalam bentuk peraturan pemerintah tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan pemerintah provinsi daerah otonom, dimana sistem informasi nasional ditetapkan oleh pemerintah pusat dimaksudkan agar terbangun infrastruktur sistem informasi pemerintahan yang handal dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pengelolaan pemerintahan khususnya pengelolaan informasi dan komunikasi yang berkualitas dalam menunjang pelaksanaan pembangunan di bidang informasi dan komunikasi.

Upaya dalam meningkatkan layanan pemerintah melalui sistem informasi yang terintegrasi dan handal, memerlukan kesamaan pemahaman, tindakan, dan keterpaduan langkah dari seluruh unsur kelembagaan pemerintah, serta dukungan dari berbagai pihak sebagai respon positif terhadap program pemerintah dalam bidang teknologi komunikasi dan informasi tentang pembangunan dan pengolahan infrastruktur dan manajemen sistem informasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan kota (Menkominfo 2004).

Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data informasi dan komunikasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan maka peranan pemerintah kabupaten/kota dan dukungan oleh kelembagaan informasi dan komunikasi pemerintah daerah sebagai pelaksana terdepan dalam melayani masyarakat di bidang informasi perlu kolaborasi dalam ruang lingkup sistem informasi nasional untuk berperan penting dalam penyediaan layanan kepada masyarakat dan sebagai pemerintahan yang berkaitan langsung dalam beberapa

perbedaan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi khususnya pemerintah kabupaten/kota dimana sistem informasi pelayanan kepada masyarakat memiliki fungsi yang lebih besar dibandingkan sistem informasi lainnya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Keberadaan pemerintah kabupaten dan kota sebagai struktur pemerintahan yang paling dekat dan berpengaruh langsung kepada masyarakat dalam setiap kebijakan yang dibuatnya maka kelembagaan informasi dan komunikasi daerah harus menjadi suatu lembaga yang terpenting dalam mengelolah informasi mulai dari menghimpun informasi, memproses informasi, dan menyebarkan informasi, selain itu seharusnya perlu disediakan sebagai penyedia informasi yang dapat digunakan oleh masyarakat secara mudah, cepat dan murah, karena pemerintahan kabupaten dan kota merupakan pemerintahan yang paling banyak terkait dengan penyedia layanan kepada masyarakat terutama dalam bidang informasi dan komunikasi melalui Dinas Infokom sebagai pengelola informasi publik di daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Yang dimaksud dengan penelitian deskriptif menurut Nasir yaitu suatu metode dengan meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, atau suatu kilas peristiwa pada masa sekarang (Nasir 1999). Adapun tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau tulisan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.

Pengertian di atas sejalan dengan Nawawi (1999) yang memberikan definisi metode deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subjek, objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain), pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara, merupakan suatu cara untuk mendapatkan data penelitian dengan mengadakan wawancara langsung atau dialog antara peneliti dengan subjek atau responden penelitian seperti pejabat yang ada pada Dinas Infokom Kabupaten Maluku Tenggara atau pihak lain yang terkait dengan penelitian ini. Menurut Nasir, pengertian wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau informan dengan menggunakan alat yang digunakan yaitu pedoman wawancara atau *interview guide* (Nasir 1999). Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara berstruktur yaitu metode wawancara yang disusun secara terperinci, membuat garis-garis besarnya saja yang akan ditanya secara langsung.

Selain itu digunakan teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya (Arikunto 2002). Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan melihat dokumen-dokumen atau catatan-catatan resmi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data yang dikumpulkan dengan teknik ini merupakan data sekunder.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Menurut Arikunto sampel merupakan sebagian dari populasi yang diambil dan digunakan untuk menentukan ciri dan sifat yang dikehendaki oleh populasi (Arikunto 2002). Metode *sampling* yang dipilih dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yang artinya teknik pengumpulan *sample* dengan pertimbangan tertentu. Arikunto menyatakan bahwa *sampling* dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas *strata random* tetapi didasarkan adanya tujuan tertentu (Arikunto 2002). Teknik ini biasanya dilaksanakan karena beberapa pertimbangan diantaranya waktu, tenaga, dan dana. Berdasarkan pemahaman penarikan *sample* tersebut, maka *sample* penelitian ini meliputi pimpinan lembaga informasi komunikasi (Kepala Dinas Informasi Komunikasi Kabupaten Maluku Tenggara), pejabat struktural unit informasi dan komunikasi, pejabat fungsional unit kerja informasi dan komunikasi tersebut.

Definisi operasional yang dapat diuraikan dalam penelitian ini, yang diharapkan dapat memberikan gambaran awal atau batasan dari hasil penelitian yang ditetapkan adalah pengelolaan dalam penelitian ini diartikan sebagai suatu aktivitas (pelaksanaan tugas dan fungsi) lembaga informasi dan komunikasi daerah dalam menghimpun, memproses, dan menyebarkan informasi publik. Informasi publik dalam penelitian ini diartikan sebagai suatu pesan yang penting diketahui oleh publik dalam rangka mendukung aktivitasnya seperti peraturan, kebijakan, dan program pemerintah, baik yang bersifat nasional maupun daerah. Lembaga informasi dan komunikasi dalam

penelitian ini yaitu suatu instansi pemerintah daerah yang melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang informasi dan komunikasi, serta tugas lainnya yang relevan (Studi Penelitian Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Maluku Tenggara).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kelembagaan informasi komunikasi yang ada saat ini berbeda baik nama kelembagaannya maupun tingkat eselon kelembagaannya. Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Maluku Tenggara yang telah ditetapkan oleh Bupati Maluku Tenggara merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Dinas Infokom Kabupaten Maluku Tenggara mempunyai tugas pokok merumuskan, membina, dan mengendalikan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi meliputi, pendayagunaan media, radio siaran pemerintah kota, serta penyelenggaraan siaran swasta. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi dimana setiap kegiatan selalu diharapkan mencapai target 12 kali selama setahun atau 1 kali setiap bulan dari berbagai kegiatan yang dilakukan termasuk kegiatan menghimpun data dan informasi publik serta penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan informasi dan komunikasi, pemberdayaan kelembagaan, dan radio siaran pemerintah kabupaten.

Selain itu penyusunan rencana dan program di bidang pengembangan informasi dan komunikasi dan pendayagunaan kelembagaan dan radio siaran pemerintah kabupaten, sehingga

jenis data informasi publik yang dihimpun berkaitan dengan peraturan daerah kabupaten, kebijakan bupati terutama perizinan, serta perpajakan dan sebagainya sebagai bahan sosialisasi dengan maksud untuk menyesuaikan pelayanan publik sesuai dengan harapan Bupati Maluku Tenggara. Kegiatan lainnya adalah melakukan *klipping* surat kabar sebagai bentuk kegiatan menghimpun dan mendata karena hal ini merupakan bagian evaluasi kepada Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Maluku Tenggara untuk dijadikan sebagai bahan laporan kepada bupati dengan frekuensi kegiatan pertiga kali setiap bulannya dengan mengelompokkan setiap kegiatan melalui surat kabar dengan bobot yang telah ditentukan. Hal ini sejalan dengan fungsi pelaksanaan pengendalian teknis operasional di bidang pengembangan informasi dan komunikasi serta pendayagunaan media informasi.

Kelembagaan informasi dan komunikasi di daerah pada prinsipnya mengalami perubahan nama lembaga dan tupoksi lembaga yang tidak seragam seperti ada masa Departemen Penerangan Era Orde Baru atau sebelum adanya pelaksanaan otonomi daerah, namun kelembagaan informasi dan komunikasi tersebut masih tetap melakukan tugas-tugas dengan menghimpun dan mengumpulkan data/informasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga informasi dan komunikasi daerah berbeda nama dan tingkat jenjang struktur tetapi tetap proaktif untuk menghimpun informasi publik khususnya yang diproduksi oleh pemerintah daerah seperti peraturan daerah, kebijakan pemerintah daerah, perizinan, perpajakan, dan distribusi menjadi sangat penting untuk dihimpun karena informasi tersebut sangat

penting untuk pengembangan dan kemajuan daerah.

Mengenai informasi nasional yang diproduksi pemerintah pusat sepertinya tidak menjadi suatu kewajiban untuk dihimpun oleh setiap lembaga informasi dan komunikasi daerah, disebabkan karena lembaga informasi dan komunikasi daerah tidak memiliki garis struktural dengan kelembagaan informasi dan komunikasi di tingkat provinsi dan tingkat pusat, begitu juga anggaran yang dipergunakan adalah murni Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten dan Kota.

Lembaga informasi dan komunikasi yang menjadi objek penelitian memang ada kecenderungan tidak mendeskripsikan suatu keseragaman dalam pelaksanaan tugas menghimpun informasi publik, hal ini dikarenakan tidak adanya kesamaan visi dan misi dari lembaga informasi dan komunikasi tersebut sehingga aktivitas mengalami proses dan frekuensi yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat daerah. Fenomena seperti ini menunjukkan adanya konsistensi dari daerah terhadap kebijakan yang terkait dengan pengolahan informasi oleh lembaga informasi daerah, namun konsistensi tersebut sebagai suatu landasan bahwa kelembagaan informasi dan komunikasi daerah masih menjadi terdepan dalam pengelolaan informasi publik dengan tidak memandang status dan bentuk kelembagaannya yang bermacam-macam karena hal itu tidak menjadi suatu hambatan seperti yang tergambar pada aktivitas dalam menghimpun/mengumpulkan informasi publik kelembagaan informasi dan komunikasi yang menjadi objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan informasi dan komunikasi daerah khususnya Dinas

Informasi dan Komunikasi Kabupaten Maluku Tenggara tidak serta merta menghimpun informasi publik dari pemerintah pusat. Hal ini menjadi suatu persoalan tersendiri yang perlu dipikirkan ke depan agar ada sinergitas dalam menghimpun informasi publik baik informasi publik produk daerah maupun nasional karena kedua informasi publik tersebut sangat perlu disosialisasikan untuk diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Selain itu perlu adanya suatu program perpaduan pelaksanaan sistem informasi nasional dan daerah dengan tujuan untuk mendorong kelembagaan informasi dan komunikasi pemerintah dengan mengoptimalkan infrastruktur dalam pengelolaan sistem informasi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota agar dapat menciptakan jaringan informasi yang terintegrasi antara semua elemen pemerintah dan semua strata dengan tujuan untuk membangun kepercayaan terhadap kredibilitas pemerintah.

Untuk memperoleh informasi dan komunikasi publik terutama kegiatan yang terkait dengan pemrosesan data/informasi publik, yang melaksanakan tugas ini dibebankan kepada bidang pengembangan informasi dan komunikasi yang dijabarkan dalam dua seksi yang ada di Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Maluku Tenggara yaitu pengembangan dan pengelolaan dengan dasar peraturan daerah. Khusus seksi pengembangan ditugaskan untuk menyusun rencana kerja dengan menyesuaikan kebijakan yang telah digariskan dalam jabatan dan tugas sehingga dalam penyusunan/pengelolaan data informasi disesuaikan dengan kebutuhan waktu termasuk presentasi dari media, sehingga setiap satu bentuk berita diproses sesuai kebutuhan dalam bentuk laporan dan hal ini dibuat setiap bulannya.

Dipandang perlu untuk pengembangan informasi dan komunikasi dalam menyusun materi-materi lain yang terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan untuk konsumsi Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Maluku Tenggara sesuai tugas dan fungsinya sebagai laporan kepada pimpinan dalam hal ini Bupati Maluku Tenggara sebagai pengambil kebijakan.

Kegiatan pemrosesan data dan informasi adalah untuk pengembangan dan pemberdayaan sistem informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan kualitas informasi di kabupaten dan kota yang nampaknya dapat menjawab tantangan yang berkembang dengan melakukan pemrosesan data informasi dengan melalui berbagai sarana dan prasarana yang dimanfaatkan secara optimal agar data tersebut menjadi akurat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan keputusan. Selain itu kemudahan-kemudahan dalam pemanfaatan untuk menyukseskan data dan informasi tersebut juga diharapkan dapat tercipta.

Sarana berbasis informasi komunikasi dan teknologi yang dimanfaatkan lembaga informasi dan komunikasi Dinas Infokom Kabupaten Maluku Tenggara yang telah diperoleh masih sinergis dengan sarana yang tergolong manual, karena bagaimanapun juga kondisi masyarakat masih berada pada tingkat atau strata yang berbeda. Oleh karena itu di satu sisi sarana yang tergolong manual cukup efektif untuk digunakan dalam pemrosesan informasi melalui suatu kegiatan tradisional dimana masyarakat masih meminatinya. Hasil penelitian atau temuan tersebut menunjukkan bahwa teknologi informasi

merupakan suatu kebutuhan untuk digunakan dalam rangka memajukan berbagai potensi dengan cara melakukan pemrosesan informasi untuk memberikan informasi yang terkait dengan potensi pembangunan terutama bidang ekonomi yang dapat menjadi suatu nilai investasi yang cukup memberikan harapan kedepan untuk kesejahteraan masyarakat. Karena pentingnya teknologi informasi tersebut maka semua pemrosesan data dan informasi melalui teknologi informasi yang dilakukan pada Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Maluku Tenggara hendaknya lebih maksimal.

Penyebaran atau pelayanan informasi publik terutama kegiatan yang terkait dengan tugas pelayanan/penyebaran informasi publik disesuaikan dengan tugas dan fungsinya, hal ini dilakukan secara koordinatif berdasarkan kajian kebutuhan masyarakat, selain itu juga melalui dialog interaktif/ceramah, diskusi baik langsung maupun melalui media informasi dan komunikasi, kemudian melakukan produksi siaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan pola siaran yang ditetapkan, melaksanakan siaran berita secara kontinyu baik *relay* berita maupun pemberitaan khusus, dan melakukan kerjasama dengan pengelolaan siaran yang profesional dengan lembaga penyiaran yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara.

Untuk memenuhi jenis-jenis kegiatan yang disinergikan dengan tugas/fungsi Dinas Informasi dan Komunikasi dengan instansi pelayanan publik di Kabupaten Maluku Tenggara mengumpulkan dan menyusun laporan apresiasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah sebagai proses umpan balik, maka Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Maluku Tenggara menjadi

fasilitator informasi publik untuk menyebarkan kebijakan-kebijakan tersebut dengan mengoptimalkan informasi dengan segala sarana/prasarana yang dimiliki lembaga lain yang bermitra dengan Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Maluku Tenggara. Berdasarkan hasil analisis kelembagaan informasi dan komunikasi yang menjadi objek dalam kajian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan penyebaran informasi publik menjadi sangat penting untuk dilaksanakan melalui beberapa sarana komunikasi yang dimiliki baik yang berbasis ICT maupun penyebaran dengan bentuk tatap muka. Terbukti dengan frekuensi penyebaran informasi publik dengan memanfaatkan semua fasilitas informasi yang ada baik dalam lingkungan internal lembaga maupun pemberdayaan kemitraan dengan melakukan koordinasi secara aktif.

Hal yang positif adalah, kelembagaan informasi dan komunikasi daerah seperti Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Maluku Tenggara masih mengutamakan tugas pelaksanaan penyebaran informasi publik kepada masyarakat, karena disadari bahwa segala bentuk yang terkait dengan informasi produk pemerintah adalah sesungguhnya wajib diketahui dan dipahami oleh publik. Dengan demikian lembaga informasi dan komunikasi pemerintah daerah secara efektif melakukan kegiatan dalam bentuk sosialisasi dengan memanfaatkan potensi kelembagaan yang ada. Adapun persoalan tersendiri adalah informasi publik nasional yang tidak sinergi secara struktur untuk disosialisasikan oleh lembaga informasi dan komunikasi daerah, hal ini dapat digambarkan bahwa penyebaran informasi yang dilakukan oleh lembaga informasi dan komunikasi tersebut telah

memperlihatkan penyebaran informasi publik produk pemerintah pusat dengan baik.

PENUTUP

Pengelolaan informasi pada Dinas Komunikasi dan Informasi dalam peranannya sebagai lembaga informasi dan komunikasi (Dinas Informasi Dan Komunikasi Kabupaten Maluku Tenggara) sangat strategis dalam rangka penyebaran informasi publik dan menyerap aspirasi masyarakat untuk dihimpun dan diproses sebagai bahan pertimbangan untuk kebijakan pemerintah. Selanjutnya tingkat koordinasi disejajarkan kelembagaan pemerintah sebagai upaya dalam menghimpun informasi yang akan diproses dan disosialisasikan ke publik melalui jenis-jenis informasi dari berbagai macam kegiatan penyusunan rencana dan program di bidang pengembangan dan pendayagunaan kelembagaan informasi dan radio pemerintah kota maupun radio swasta. Maka Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Maluku Tenggara senantiasa berupaya untuk meningkatkan pengelolaan informasi agar kualitas informasi valid dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dari sisi fungsi kelembagaan informasi dan komunikasi dalam mengolah informasi publik, hasil temuan menunjukkan bahwa kelompok informasi yang ada sebagai binaan Dinas Informasi dan Komunikasi hendaknya selalu bersinegi dalam rangka menghimpun, memproses dan menyebarkan informasi secara teratur. Selain itu teknologi informasi menjadi sangat penting khususnya *website*, karena dapat menyiapkan data dan informasi tentang potensi Kabupaten Maluku Tenggara

dengan tujuan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan teknologi informasi tersebut dalam rangka menunjang tugas-tugas pemerintah daerah. Pemerintah dalam hal ini Dinas Infokom Kabupaten Maluku Tenggara diharapkan senantiasa melakukan koordinasi terkait kebijakan dengan instansi lain sebagai suatu kegiatan konkret untuk menghimpun informasi publik, dan selanjutnya diolah dengan melalui komputerisasi sebagai salah satu sarana untuk memproses informasi. Hasil temuan dalam penelitian ini menggambarkan bahwa dalam penyebaran informasi dan komunikasi masih mengefektifkan informasi secara langsung secara intensif. Dalam Pengelolaan informasi pada Dinas Komunikasi dan Informasi, untuk kelancaran pengelolaan informasi publik, khususnya informasi publik yang terkait dengan kebijakan pemerintah pusat seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Inpres dan sebagainya agar dapat tersosialisasi dengan baik kepada seluruh lapisan masyarakat daerah dengan memprogramkan suatu peraturan pemerintah yang tidak berseberangan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, dalam upaya menciptakan kegiatan-kegiatan keterpaduan sistem informasi nasional dengan sistem informasi daerah, dalam rangka mengintegrasikan sistem informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi secara tepat sehingga proses layanan pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Menciptakan sinergitas antara pemerintah pusat dengan daerah khususnya lembaga informasi dan komunikasi daerah dalam bentuk upaya untuk memperlancar pengolahan informasi publik baik bersifat nasional maupun

daerah dan selanjutnya aspirasi dari masyarakat akan menjadi bahan untuk pengolahan informasi pada pemerintah yang terkait dengan kebijakan. Hal ini sangat perlu karena dapat mengatur informasi dengan melalui keterpaduan sistem informasi dengan menciptakan jaringan informasi yang terintegrasi dengan tujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas pemerintah dan semua strata.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dalam era otonomi daerah sangat terasa dengan tidak adanya komunikasi secara rutin yang dibangun oleh pemerintah pusat (Kementerian Komunikasi dan Informatika) dengan kelembagaan informasi dan komunikasi pemerintah daerah, oleh karenanya interaksi positif dari kelembagaan informasi dan komunikasi baik yang berkedudukan di daerah maupun di pusat harus dibangun menjadi suatu bentuk yang tidak terpisahkan secara fungsional dan operasional. Karena yang terpenting adalah bagaimana kelembagaan informasi dan komunikasi dalam hal ini Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Maluku Tenggara menjadi ujung tombak untuk mengelola informasi publik pusat dan daerah dan dapat bersinergi dengan kebijakan yang diambil pemerintah daerah. Perlunya informasi dan komunikasi merupakan hasil pengelolaan data sehingga menjadi bentuk bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Untuk memperoleh informasi diperlukan adanya data yang akan diolah di unit pengelolah tranformasi data menjadi informasi sehingga diperoleh suatu keputusan yang benar didasarkan pada informasi yang benar dan informasi

yang benar didasarkan pada data yang akurat kemudian secara berkala akan menjadi laporan pelaksanaan kegiatannya kepada lembaga informasi dan komunikasi pemerintah sebagai evaluasi pengelolaan informasi publik dalam pengambilan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.S., Ahmad. *Manusia dan Informasi*. Ujung Pandang: Hasanudin University Press, 1990.
- Alter. *Pengantar Sistem Informasi*. Bandung : Armico, 1992.
- Arief, M. *Sistem Informasi Manajemen dan Globalisasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Arikunto, Suharsimin. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Bugin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Air Langga University Press, 2001.
- Departemen Dalam Negeri. *Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. 1992.
- Departemen Dalam Negeri. *Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. 2004.
- Departemen Koinfo. *laporan hasil penelitian dan pengembangan wilayah komunikasi dan informatika tentang Study Kasus Pengelolaan Informasi Publik Lembaga Infokom Daerah di Sulawesi Selatan*. Makassar: BBPI Wilayah VII Makassar, 2006.
- Effendy., Onong Uchjana . *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hafied, Changara . *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2000.
- Hall. *Pengenalan Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta.: Rajawali Press, 2000.
- Kansil, C.S.T. , dan Christine S.T. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Menkominfo. *Keputusan Menkominfo Nomor 69/Kep/M/10/2004 tentang Panduan Teknis Manajemen Data, Informasi Organisasi dan Sistem Informasi*. 2004.
- Nasir, Moh. *Metode Penelitian, Galia Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Nurudin. *System Komunikasi Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Widjaja, H. A.W. *Ilmu Komunikasi Pengantar Studi*. Jakarta : Rineka Cipta, 2000.